

SKRIPSI

**PENGEMBANGAN OBJEK WISATA BENTENG SOMBA OPU
OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2020

**PENGEMBANGAN OBJEK WISATA BENTENG SOMBA OPU
OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

NURFATIMAH ULFA S

Nomor Stambuk: 1056 1044 3612

16/09/2021

1 exp

Sumbangan Alumni

R/0230/ADN/2109

ULF

PI

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Penelitian : Pengembangan Objek Wisata Benteng Somba Opu
oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Mahasiswa : Nurfatimah Ulfa. S

Nomor Stambuk : 105610443612

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.


Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

Diketahui Oleh:

Dekan,

Ketua Jurusan,

Fisip Unismuh Makassar

Ilmu Administrasi Negara



Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos., M.Si.
NBM: 730727



Nasrul Haq, S.Sos., MPA
NBM : 1067 436

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan / undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0089/FSPA.4-II/II/41/2020, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari sabtu tanggal 29 bulan februari tahun 2020.



1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

()

2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

()

3. Dr. Jaelan Usman, M.Si.

()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Nurfatimah Ulfa. S

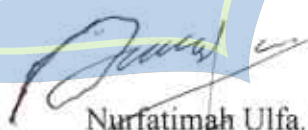
Nomor Stambuk : 1056 1044 3612

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 26 Februari 2020

Yang Menyatakan


Nurfatimah Ulfa. S

ABSTRAK

NURFATIMAH ULFA, S. 2020. Pengembangan Objek Wisata Benteng Somba Opu oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Provinsi Sulawesi Selatan (dibimbing oleh Ihyani Malik dan Nurbiah Tahir).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan objek wisata Benteng Somba Opu Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 23 Mangkura, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe deskriptif, dimana data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang yang terdiri dari 5 orang pegawai yang bekerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan satu orang pengelola Benteng Somba Opu.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pengembangan objek wisata Benteng Somba Opu oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Provinsi Sulawesi Selatan terindikasi dalam beberapa hal yaitu: (1) Upaya promosi Benteng Somba Opu pada dalam beberapa tahun terakhir tidak dilakukan karena masih dalam tahap pembenahan dan upaya penetapan sebagai kawasan cagar budaya, (2) Dilakukan pengembangan aksesibilitas menuju tempat wisata Benteng Somba Opu dengan membuat penganggaran untuk memperbaiki akses jalan dan bersinergi dengan pihak terkait dalam pembangunan jalan, (3) Pengembangan kawasan objek wisata Benteng Somba Opu yang ditunjukkan dengan upaya pembebasan lahan, pengembangan sarana pendukung, dan penetapan Benteng Somba Opu sebagai cagar budaya nasional yang menambah eksistensi Benteng Somba Opu sebagai objek wisata sejarah dan budaya, (4) Dilakukan upaya pelestarian produk wisata Benteng Somba Opu melalui proses ekskavasi dan revitalisasi, (5) Dilakukan pengembangan sumber daya manusia di dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan ditunjukkan dengan adanya bagian pengembangan Sumber Daya Manusia dan adanya proses perekrutan anggota yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, (6) Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Povinsi Sulawesi Selatan bukan hanya terlibat dalam kampanye sadar wisata melainkan sebagai pembina utama sekaligus penanggung jawab kegiatan tersebut.

Kata kunci: pengembangan objek wisata, Benteng Somba Opu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang terindah dan teragung selain mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas petunjuk dan bimbingan-Nya, sehingga skripsi ini yang berjudul “Pengembangan Objek Wisata Benteng Somba Opu oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan” dapat diselesaikan oleh penulis walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kepada pembaca yang budiman, agar dapat memberikan masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si. sebagai pembimbing I dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP sebagai pembimbing II, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis sejak pengusulan judul sampai kepada penyelesaian skripsi ini. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.
3. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Nasrulhaq, S.Sos., MPA yang telah membina Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

4. Dosen Fisipol, Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.
5. Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang telah membantu dalam proses penelitian hingga selesai.
6. Teman-teman kelas D angkatan 2012 Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak memberi saran, dukungan, dan motivasi kepada penulis.

Semoga bantuan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.. Amin.

Makassar, 26 Februari 2020


Nurfatimah Ulfa S

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENERIMAAN TIM.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pengembangan Objek Wisata.....	6
B. Benteng Somba Opu.....	23
C. Kerangka Pikir.....	26
D. Fokus Penelitian.....	28
E. Deskripsi Fokus.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	30

B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	30
D. Informan Penelitian.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Teknik Pengabsahan Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
B. Pengembangan Kebijakan Pariwisata Benteng Somba Opu.....	43
C. Pembahasan.....	54
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Informan Penelitian.....31



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Bagan Kerangka Pikir	27
Gambar 4.1.	Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.....	39



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Objek wisata merupakan tempat-tempat yang menjadi tujuan berwisata atau melakukan rekreasi. Objek wisata dapat berupa objek wisata pantai, gunung, laut atau berupa objek wisata bangunan seperti museum, benteng, situs peninggalan sejarah, dan lain-lain. Umumnya di beberapa daerah atau negara, untuk memasuki suatu objek wisata para wisatawan diwajibkan untuk membayar biaya masuk atau karcis masuk yang merupakan biaya retribusi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas objek wisata tersebut. Beberapa objek wisata ada yang dikelola oleh pemerintah dan ada yang dikelola oleh pihak swasta. Objek wisata yang dikelola oleh pihak swasta dapat berupa objek wisata alami atau buatan. Marpaung (2002:78) mengemukakan bahwa objek dan daya tarik wisata adalah suatu bentuk dari aktifitas dan fasilitas yang berhubungan, yang menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Objek dan daya tarik wisata sangat erat hubungannya dengan *travel motivation* dan *travel fasion*, karena wisatawan ingin mendapatkan suatu pengalaman tertentu dalam kunjungannya ke suatu objek wisata.

Saat ini kita sedang dihadapkan pada kondisi masyarakat dunia dan masyarakat Indonesia yang sedang mengalami perubahan menghadapi tata hubungan antara bangsa yang semakin terbuka dan bebas hal ini perlunya mendorong perubahan tatanan kehidupan masyarakat. Arus informasi budaya yang datang dari luar tidak dapat dicegah sehingga apabila tidak waspada,

dikhawatirkan akan dapat mengancam ketahanan budaya bangsa. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat ketahanan budaya menjadi salah satu tugas penting dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata, berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang pembangunan Nasional (PROPENAS) Tentang Pembangunan Sosial dan Budaya ditetapkan bahwa pembangunan kebudayaan dan pariwisata dilaksanakan melalui program pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan program pengembangan pariwisata. Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat kepada warisan budaya bangsa. Keagamaan budaya dan tradisi, meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat, menumbuhkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dan memperkuat ketahanan budaya.

Pembangunan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari situasi, perubahan dan dinamika yang terjadi di tingkat nasional, regional, maupun internasional yang satu sama lain berpengaruh dan terpengaruh. Pembangunan dan pengembangan objek wisata merupakan bidang yang multisektoral. Untuk memenuhi kebutuhan langsung maupun tidak langsung, melibatkan semua sektor pembangunan dan pengembangan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan dan pengembangan objek wisata banyak bergantung dari dukungan berbagai sektor. Dalam hal ini peran pemerintah dalam pengembangan objek wisata juga sangat penting dalam melestarikan cagar budaya dan memberikan arahan pengajaran dalam pembinaan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdaya manusia, untuk mengelola pariwisata cagar budaya peninggalan sejarah, dan dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk mengelola dan

mengembangkan. Dalam upaya pengembangan kawasan tersebut, kita dapat merujuk pada UU RI NO. 5 tahun 1992 dan PP RI NO. 10 tahun 1993, yang secara jelas termaktub bahwa benda cagar budaya dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata. Merujuk pada produk hukum tersebut merujuk pada pasal-pasalanya, maka pemanfaat benda cagar budaya sebagai objek wisata sah secara hukum. Pemanfaatan benda cagar budaya sebagai objek wisata sebagaimana yang diatur dari kedua produk hukum tersebut, harus tetap menjaga kelestarian dari benda cagar budaya itu sendiri. Dalam UU RI No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, juga diatur secara jelas bahwa pembangunan, dan pengembangan pariwisata harus tetap menjaga kelestarian budaya.

Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan juga memiliki objek wisata yang tidak kalah menarik dari tempat tempat lainnya. Salah satunya adalah Benteng Somba Opu yang merupakan objek wisata sejarah dan merupakan cagar budaya yang harus dilestarikan dan dirawat. Namun pada kenyataannya, kondisi Benteng Somba Opu sendiri bisa dikatakan tidak terawat, bangunan yang ada di Benteng Somba Opu, seperti rumah adat, dan tidak adanya batas-batas lahan di Benteng Somba Opu yang menjadi tanda milik pemerintah provinsi dan yang mana milik masyarakat sekitar, serta bangunan rumah penduduk yang masih sebagian semraut hampir sebagian tidak terawat dan lapuk dimakan usia. Ditambah lagi pada papan histori Benteng Somba Opu pun rusak karena coretan-coretan dan pada bagian depannya, terdapat bangunan-bangunan permanen dari batu bata yang dulunya menjadi fasilitas pameran merupakan replika instansi pemerintahan maupun perusahaan dan lembaga-lembaga pendidikan. Itu pun juga sudah kumuh dan

nampak tidak terurus. Ironisnya, hampir semua bangunan itu telah dihuni warga dan menjelma menjadi pemukiman warga. Sebagian lokasi kawasan bersejarah ini kemudian dimanfaatkan oleh segelintir pengusaha swasta dan membangun sarana hiburan. Bisa dibilang hampir tidak ada inovasi yang dilakukan untuk menjaga keberadaan benda-benda bersejarah di Benteng Somba Opu dan juga pelestarian sejarah kawasan itu.

Kenyataan tersebut di atas menunjukkan perlunya upaya pengembangan objek wisata Benteng Somba Opu yang dimotori oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sangat diperlukan karena pemerintahlah yang berperan sebagai eksekutor dan pemegang rencana penganggaran dalam pembangunan termasuk pembangunan objek-objek wisata. Pemerintah memiliki kewenangan dalam mengeluarkan regulasi atau kebijakan untuk pengembangan objek-objek wisata sehingga objek wisata tersebut antara lain dapat menjadi identitas kebudayaan masyarakat setempat dan menambah pendapatan bagi daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian yang berjudul "Pengembangan Objek Wisata Benteng Somba Opu oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Provinsi Sulawesi Selatan".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pengembangan objek wisata Benteng Somba Opu oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan objek wisata Benteng Somba Opu oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupaun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

2. Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah dalam upaya memperhatikan Wisata Budaya Benteng Somba Opu di Kabupaten Gowa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengembangan Objek Wisata

1. Konsep Pariwisata

Kata pariwisata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai hal yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, pelancongan, turisme. Menurut Mathieson & Wall dalam Pitana & Gayatri (2007), bahwa pariwisata adalah kegiatan perpindahan orang untuk sementara waktu ke destinasi di luar tempat tinggal dan tempat bekerjanya dan melaksanakan kegiatan selama di destinasi dan juga penyiapan-penyiapan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Secara etimologis menurut Purwanto & Hilmi (1994: 9), istilah pariwisata berasal dari Bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu *pari* dan *wisata*. *Pari* berarti banyak, berkali-kali atau lengkap sedangkan *wisata* berarti perjalanan atau bepergian. Kata tersebut mempunyai persamaan kata dalam Bahasa Inggris *tourism* dan Bahasa Belanda *tourisme*. Awal mula tercetusnya pengertian pariwisata dan wisatawan ini pada abad 17 di Perancis, kemudian pada tahun 1972 Maurice menerbitkan buku "*The True Guide For Foreigners Travelling in France to Appreciate its Beealities, Learn the language and take exercise*".

Menurut Yoeti (1996:118), pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk usaha atau mencari nafkah di tempat

yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Ismayanti (2010) mendefinisikan pariwisata sebagai aktivitas ekonomi yang harus dilihat dari dua sisi yakni sisi permintaan (*demand side*) dan sisi pasokan (*supply side*). Lebih lanjut dia mengemukakan bahwa keberhasilan dalam pengembangan pariwisata di suatu daerah sangat tergantung kepada kemampuan perencana dalam mengintegrasikan kedua sisi tersebut secara berimbang ke dalam sebuah rencana pengembangan pariwisata.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dikemukakan bahwa: pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang kunjungan seseorang atau beberapa orang ke tempat-tempat tertentu dalam jangka waktu sementara untuk menikmati saat-saat ketika berada di tempat tersebut.

2. Unsur-Unsur Pariwisata

Menurut Spillane dalam Badrudin (2001), ada lima unsur industri pariwisata yang sangat penting, yaitu:

a. *Attractions* (daya tarik)

Attractions dapat digolongkan menjadi *site attractions* dan *event attractions*.

Site attractions merupakan daya tarik fisik yang permanen dengan lokasi yang tetap yaitu tempat-tempat wisata yang ada di daerah tujuan wisata seperti

pantai, kebun binatang, keratin, dan museum. Sedangkan *event attractions* adalah atraksi yang berlangsung sementara dan lokasinya dapat diubah atau dipindah dengan mudah seperti festival-festival, pameran, atau pertunjukan-pertunjukan kesenian daerah.

b. *Facilities* (fasilitas-fasilitas yang diperlukan)

Fasilitas cenderung berorientasi pada daya tarik di suatu lokasi karena fasilitas harus terletak dekat dengan pasarnya. Selama tinggal di tempat tujuan wisata wisatawan memerlukan tidur, makan dan minum oleh karena itu sangat dibutuhkan fasilitas penginapan. Selain itu ada kebutuhan akan support industries yaitu toko souvenir, took cuci pakaian, pemandu, daerah festival, dan fasilitas rekreasi (untuk kegiatan).

c. *Infrastructure* (infrastruktur)

Daya tarik dan fasilitas tidak dapat dicapai dengan mudah kalau belum ada infrastruktur dasar. Perkembangan infrastruktur dari suatu daerah sebenarnya dinikmati baik oleh wisatawan maupun rakyat yang juga tinggal di sana, maka ada keuntungan bagi penduduk yang bukan wisatawan. Pemenuhan atau penciptaan infrastruktur adalah suatu cara untuk menciptakan suasana yang cocok bagi perkembangan pariwisata.

d. *Transportations* (transportasi) Dalam pariwisata kemajuan dunia transportasi atau pengangkutan sangat dibutuhkan karena sangat menentukan jarak dan waktu dalam suatu perjalanan pariwisata. Transportasi baik transportasi darat, udara, maupun laut merupakan suatu unsur utama langsung yang merupakan tahap dinamis gejala-gejala pariwisata.

e. *Hospitality* (keramah tamahan)

Wisatawan yang berada dalam lingkungan yang tidak mereka kenal memerlukan kepastian jaminan keamanan khususnya untuk wisatawan asing yang memerlukan gambaran tentang tempat tujuan wisata yang akan mereka datangi. Maka kebutuhan dasar akan keamanan dan perlindungan harus disediakan dan juga keuletan serta keramah tamahan tenaga kerja wisata perlu dipertimbangkan supaya wisatawan merasa aman dan nyaman selama perjalanan wisata.

3. Jenis-jenis Pariwisata

Pendit (1999: 42-48) memperinci penggolongan pariwisata menjadi beberapa jenis yaitu:

a. Wisata Budaya

Wisata budaya merupakan perjalanan wisata atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan seseorang dengan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka.

b. Wisata Kesehatan

Hal ini dimaksudkan dengan perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari di mana ia tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan rohani dengan mengunjungi tempat peristirahatan seperti mata air panas mengandung mineral yang dapat menyembuhkan, tempat yang memiliki iklim udara menyehatkan atau tempat yang memiliki fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya.

c. Wisata Olah Raga

Wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam peserta olahraga disuatu tempat atau negara seperti Asian Games, Olympiade, Thomas Cup, Uber Cup dan lain-lain.

d. Wisata Komersial

Dalam jenis ini termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial, seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya.

e. Wisata Industri

Perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa, atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah perindustrian dimana terdapat pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar dengan maksud tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian.

f. Wisata Politik

Perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil bagian aktif dalam peristiwa kegiatan politik.

g. Wisata Konvensi

Perjalanan yang dilakukan untuk melakukan konvensi atau konferensi. Misalnya APEC, KTT non Blok.

h. Wisata Sosial

Wisata sosial merupakan pengorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah untuk memberi kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi

lemah untuk mengadakan perjalanan seperti kaum buruh, pemuda, pelajar atau mahasiswa, petani dan sebagainya.

i. Wisata Pertanian

Wisata pertanian merupakan pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan dan sebagainya dimana wisatawan rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi maupun melihat-lihat keliling sambil menikmati segarnya tanaman beraneka ragam warna dan suburnya pembibitan di tempat yang dikunjungi.

j. Wisata Maritim (Marina) atau Bahari

Wisata yang dikaitkan dengan kegiatan olah raga di air, lebih-lebih danau, bengawan, teluk atau laut. Seperti memancing, berlayar, menyelam, berselancar, balapan mendayung dan lainnya.

k. Wisata Cagar Alam

Wisata ini biasanya diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, tanaman lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya.

l. Wisata Buru

Wisata untuk buru, di tempat atau hutan yang telah ditetapkan pemerintah Negara yang bersangkutan sebagai daerah perburuan, seperti di Baluran, Jawa Timur untuk menembak babi hutan atau banteng.

m. Wisata Pilgrim

Jenis wisata ini dikaitkan dengan agama, sejarah, adat-istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. Ini banyak dilakukan oleh rombongan atau perorangan ketempat-tempat suci, ke makam-makam orang besar, bukit atau gunung yang dianggap keramat, tempat pemakaman tokoh atau pimpinan yang dianggap legenda.

n. Wisata Bulan Madu

Suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan-pasangan, pengantin baru, yang sedang berbulan madu dengan fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan dan kunjungan mereka.

Menurut Suwanto (2004: 14-17) ditinjau dari segi dan motivasinya dibedakan menjadi beberapa kelompok, yakni:

a. Dari segi jumlahnya, wisatawan dibedakan atas:

- 1) *Individual tour* (wisatawan perorangan),
- 2) *Family group tour* (wisata keluarga),
- 3) *Group tour* (wisata rombongan).

b. Dari segi kepengaturannya, wisata dibedakan atas:

- 1) *Pre- arranged Tour* (wisata berencana),
- 2) *Package Tour* (wisata paket atau peket wisata),
- 3) *Coach Tour* (wisata terpimpin),
- 4) *Special arranged Tour* (wisata khusus),
- 5) *Optional Tour* (wisata Tambahan/manasuka).

c. Dari segi maksud dan tujuannya, wisata dibedakan atas:

- 1) *Holiday Tour* (wisata liburan),
- 2) *Familiarization Tour* (wisata pengenalan),
- 3) *Educational tour* (wisata pendidikan),
- 4) *Scientific tour* (wisata pengetahuan),
- 5) *Pilgrimage tour* (wisata keagamaan),
- 6) *Special mission tour* (wisata kunjungan khusus),
- 7) *Hunting tour* (wisata pemburuan)

Pariwisata menurut daya tariknya menurut Fandeli (1995:3) dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu:

a. Daya Tarik Alam

Pariwisata daya tarik alam yaitu wisata yang dilakukan dengan mengunjungi daerah tujuan wisata yang memiliki keunikan daya tarik alamnya, seperti laut, pesisir pantai, gunung, lembah, air terjun, hutan dan objek wisata yang masih alami.

b. Daya Tarik Budaya

Pariwisata daya tarik budaya merupakan suatu wisata yang dilakukan dengan mengunjungi tempat-tempat yang memiliki keunikan atau kekhasan budaya, seperti kampung naga, tanah toraja, kampung adat banten, kraton kasepuhan Cirebon, kraton Yogyakarta, dan objek wisata budaya lainnya.

c. Daya Tarik Minat Khusus

Pariwisata ini merupakan pariwisata yang dilakukan dengan mengunjungi objek wisata yang sesuai dengan minat seperti wisata olahraga, wisata rohani,

wisata kuliner, wisata belanja, dengan jenis-jenis kegiatannya antara lain bungee jumping.

Berdasarkan letak geografis tempat pariwisata berkembang menurut Yoeti (1993), meliputi:

- a. Pariwisata Lokal (*Local Tourism*) Pariwisata setempat yang mempunyai ruang lingkup relatif sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja. Misalnya pariwisata kota Bandung, DKI Jakarta, dan lain-lain.
- b. Pariwisata Regional (*Regional Tourism*) Pariwisata yang berkembang di suatu tempat atau daerah yang ruang lingkungannya lebih luas bila dibandingkan dengan *local tourism*, tetapi lebih sempit bila dibandingkan dengan *national tourism*. Misalnya Pariwisata Sumatera Utara, Bali, dan lain-lain.
- c. Pariwisata Nasional (*National Tourism*)
 - 1) Pariwisata Nasional dalam arti sempit Kegiatan pariwisata yang berkembang dalam wilayah suatu negara. Pengertian ini sama halnya dengan “pariwisata dalam negeri” atau *domestic tourism*, di mana titik beratnya orang-orang yang melakukan perjalanan wisata adalah warga negara itu sendiri dan warga asing yang berdomisili di negara tersebut.
 - 2) Pariwisata Nasional dalam arti luas Kegiatan pariwisata yang berkembang dalam wilayah suatu negara, selain kegiatan *domestic tourism* juga dikembangkan *foreign tourism*, di mana di dalamnya termasuk *in bound tourism* dan *out going tourism*.

4. Pengertian Pengembangan Objek Wisata

Objek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata (Pendit, 1999) sedangkan menurut Suwanto (2004: 19) objek wisatawan adalah potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Menurut Yoeti (1993: 167) bila melihat objek wisata itu tidak ada persiapan terlebih dahulu seperti pemandangan, gunung, sungai, danau, lembah, candi, bangunan, monument, gereja, masjid, tugu peringatan, dan lain-lain.

Ridwan (2012:5) mengemukakan pengertian objek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Menurut UU RI No 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, dinyatakan bahwa objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata baik itu pembangunan objek dan daya tarik wisata, yang dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelola dan membuat objekobjek baru sebagai objek dan daya tarik wisata.

Dalam undang-undang di atas, yang termasuk objek dan daya tarik wisata terdiri dari:

- a. Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna, seperti: pemandangan alam, panorama indah, hutan rimba dengan tumbuhan hutan tropis serta binatang binatang langka.

- b. Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, pertanian (wisata agro), wisata tirta (air), wisata petualangan, taman rekreasi, dan tempat hiburan lainnya.
- c. Sasaran wisata minat khusus, seperti: berburu, mendaki gunung, gua, industri dan kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai/air deras, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat ziarah, dan lain-lain.
- d. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Menurut Yoeti (1996), berkembangnya suatu objek wisata wisata tergantung pada produk industri pariwisata yang meliputi daya tarik wisata, kemudahan perjalanan, sarana dan fasilitas serta promosi. Pengembangan kepariwisataan dapat didefinisikan secara khusus sebagai upaya penyediaan atau peningkatan fasilitas dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Tetapi secara lebih umum pengertiannya dapat mencakup juga dampak-dampak yang terkait seperti penyerapan / penciptaan tenaga kerja ataupun perolehan / peningkatan pendapatan.

Pengembangan kepariwisataan telah terjadi dalam berbagai bentuknya. Perkembangan klasik membedakan bentuk kepariwisataan daerah pantai, daerah berhawa panas (hangat), dan bentuk tempat pariwisata atau peristirahatan (tempat pesiar) di pegunungan. Bentuk pengembangan lain ialah dari segi tempat

akomodasi, dari yang semula dalam bentuk losmen (tempat menginap) atau hotel, kemudian berupa 'college'.

Pengembangan pariwisata sangat diperlukan pada suatu daerah tujuan wisata. Menurut Instruksi Presiden Tahun 1969 tujuan pengembangan kepariwisataan adalah:

- a. Meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatankegiatan industri-industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya.
- b. Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia.
- c. Meningkatkan persaudaraan/persahabatan nasional dan internasional.

Menurut Sujali (1989: 34) pengembangan pariwisata didasarkan pada sifat, kemampuan, ruang jangkauan yang akan dicapai sedangkan menurut Yoeti (2002: 21) pengembangan suatu kawasan pariwisata meliputi:

- a. Sebagian besar sumber daya fisik atau komponen produk wisata.
- b. Analisis pengunjung potensial, kebijakan harga, dan destinasi saingan.
- c. Aspek lingkungan, budaya, dan sosial.

5. Indikator Pengembangan Objek Wisata

Menurut Yoeti (1996), suatu daerah untuk menjadi daerah tujuan wisata (DTW) yang baik, harus mengembangkan tiga hal agar daerah tersebut menarik untuk dikunjungi, yakni:

- a. Adanya sesuatu yang dapat dilihat (*something to see*), maksudnya adanya sesuatu yang menarik untuk dilihat, dalam hal ini objek wisata yang berbeda dengan tempat-tempat lain (mempunyai keunikan tersendiri). Disamping itu perlu juga mendapat perhatian terhadap atraksi wisata yang dapat dijadikan sebagai entertainment bila orang berkunjung nantinya.
- b. Adanya sesuatu yang dapat dibeli (*something to buy*), yaitu terdapat sesuatu yang menarik yang khas untuk dibeli dalam hal ini dijadikan cendramata untuk dibawa pulang ke tempat masing-masing sehingga di daerah tersebut harus ada fasilitas untuk dapat berbelanja yang menyediakan souvenir maupun kerajinan tangan lainnya dan harus didukung pula oleh fasilitas lainnya seperti money changer dan bank.
- c. Adanya sesuatu yang dapat dilakukan (*something to do*), yaitu suatu aktivitas yang dapat dilakukan di tempat itu yang bisa membuat orang yang berkunjung merasa betah di tempat tersebut.

Menurut Suwanto (2004: 56), pengembangan pariwisata termasuk didalamnya objek wisata sering dikaitkan dengan adanya Sapta Kebijakan Pengembangan Pariwisata oleh pemerintah, yaitu: promosi, aksesibilitas, kawasan pariwisata, wisata bahari, produk wisata, sumber daya manusia, dan kampanye nasional sadar wisata. Setiap aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Promosi

Promosi pariwisata harus dilaksanakan secara selaras dan terpadu, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan pasal 48 dikemukakan bahwa terdapat Badan Promosi

Pariwisata Daerah yang mempunyai tugas antara lain: meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia, meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa, dan meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan.

Wahab (1996: 151) mengemukakan bahwa promosi sebagai upaya mempertahankan, memacu volume wisatawan serta mempertahankan posisi pasar yang diperlukan dari saingan, karena munculnya negara-negara dari daerah-daerah wisata baru maka diperlukan suatu teknik promosi wisata yang baik yaitu:

- 1) Promosi beranjak dari produksi dan berkaitan dengan upaya memacu kemungkinan penjualannya.
- 2) Promosi biasanya dilakukan dengan perantara media seperti iklan, publisitas dengan segala macam caranya hubungan masyarakat.
- 3) Promosi dengan sendiri tidak cukup, karena terutama berkaitan dengan penyebaran informasi dan memacu penjualan dengan cara yang agak terpotong.
- 4) Promosi tidak mencakup kebijakan secara keseluruhan karena promosi tidak dapat berlangsung dengan sendirinya.
- 5) Promosi akan meliputi seluruh kegiatan yang merencanakan, yang termasuk didalamnya penyebaran informasi (periklanan, film, brosur, buku panduan, poster, dan sebagainya).
- 6) Promosi dilakukan melalui beragam saluran media massa surat kabar, bioskop, radio, TV, pengiriman surat dan lain-lain, kepada wisatawan real

atau yang berita dan mempengaruhi calon wisatawan agar berminat datang ke suatu daerah tujuan wisata atau supaya memanfaatkan jasa tertentu.

b. Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan salah satu aspek penting karena menyangkut pengembangan lintas sektoral (Suwantoro, 2004). Menurut Yoeti (2008: 171) "aksesibilitas adalah semua kemudahan yang diberikan bukan hanya kepada calon wisatawan yang ingin berkunjung, akan tetapi juga kemudahan selama mereka melakukan perjalanan di daerah tujuan wisata". Sedangkan menurut Muta'ali (2015:180) "aksesibilitas adalah ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem transportasi. Ukuran keterjangkauan atau aksesibilitas meliputi kemudahan waktu biaya, dan usaha dalam melakukan perpindahan antara tempat-tempat atau kawasan".

c. Kawasan Pariwisata

Pengembangan kawasan pariwisata dimaksudkan untuk:

- 1) Meningkatkan peran serta daerah dan swasta dalam pengembangan pariwisata.
- 2) Memperbesar dampak positif pembangunan.
- 3) Mempermudah pengendalian terhadap dampak lingkungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 1 dikemukakan bahwa: Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti

pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

d. Wisata Bahari

Wisata bahari merupakan salah satu jenis produk wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan.

e. Produk Wisata

Upaya untuk dapat menampilkan produk wisata yang bervariasi dan mempunyai kualitas daya saing yang tinggi. Menurut Yoeti (1996: 13), pada dasarnya ada tiga golongan pokok produk wisata yaitu:

- 1) Objek wisata yang terdapat pada daerah-daerah tujuan wisata.
- 2) Fasilitas yang diperlukan di tempat tujuan tersebut, seperti akomodasi, catering, hiburan, dan rekreasi.
- 3) Transportasi.

Ciri-ciri produk wisata adalah sebagai berikut (Yoeti, 1996: 18):

- 1) Tidak dapat dipindahkan, karena dalam penjualannya tidak mungkin pelayanan itu sendiri dibawa kepada konsumen, sebaliknya konsumen (wisatawan) yang harus datang ke tempat produk dihasilkan.
- 2) Pada umumnya peranan perantara tidak dibutuhkan.
- 3) Hasil atau produk tidak dapat ditimbun.
- 4) Hasil atau produk tidak mempunyai standar atau ukuran objektif.
- 5) Permintaan terhadap hasil atau produk wisata tidak tetap.
- 6) Hasil atau produk wisata banyak tergantung dari tenaga manusia.

f. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu modal dasar pengembangan pariwisata. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 52 mengemukakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan sumber daya manusia (SDM) berperan penting dalam pengembangan pariwisata. SDM pariwisata mencakup wisatawan/pelaku wisata (tourist) atau sebagai pekerja (employment). Peran SDM sebagai pekerja dapat berupa SDM di lembaga pemerintah, SDM yang bertindak sebagai pengusaha (wirausaha) yang berperan dalam menentukan kepuasan dan kualitas para pekerja, para pakar dan profesional yang turut berperan dalam mengamati, mengendalikan dan meningkatkan kualitas kepariwisataan serta yang tidak kalah pentingnya masyarakat di sekitar kawasan wisata yang bukan termasuk ke dalam kategori di atas, namun turut menentukan kenyamanan, kepuasan para wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut (Pajriah, 2018: 26).

g. Kampanye Nasional Sadar Wisata

Kampanye nasional sadar wisata pada hakikatnya adalah upaya memasyarakatkan Sapta Pesona yang turut menegakkan disiplin nasional dan jati diri bangsa Indonesia melalui kegiatan kepariwisataan.

Salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman pariwisata kepada masyarakat yaitu melalui Program Kampanye Sadar Wisata dan Sapta Pesona. Program kampanye nasional ini diusulkan pada gerakan Visit Indonesia Year tahun 1991 dan merupakan salah satu aspek mendasar bagi keberhasilan pembangunan

kepariwisataan. Selain itu Program Kampanye Sadar Wisata dan Sapta Pesona ini berfungsi menggerakkan daerah agar berupaya menyiapkan destinasi wisata di daerahnya untuk mengadakan kegiatan serta siap menerima wisatawan. Kampanye ini juga mendorong daerah-daerah yang berpotensi menjadi tujuan wisata namun belum dikenal masyarakat sehingga masyarakat tertarik untuk berkunjung (Utami & Rahman, 2017: 2).

Berdasarkan pendapat di atas, indikator pengembangan pariwisata Benteng Somba Opu dalam penelitian ini dilihat dalam 6 aspek yaitu yaitu: (1) promosi, (2) aksesibilitas, (3) kawasan pariwisata, (4) produk wisata, (5) sumber daya manusia, dan (6) kampanye nasional sadar wisata.

B. Benteng Somba Opu

1. Latar Belakang Berdirinya Benteng Somba Opu

Menurut Sagimun MD dalam Abbas & Arifah (2013: 37), tidak banyak orang yang tahu apa arti dan nilai serta dimana letak Benteng Somba Opu yang sebenarnya. Somba Opu adalah benteng utama ibukota dan pelabuhan internasional kerajaan Gowa pada abad XVII.

Benteng Somba Opu berada di Sapia (Desa Lama) di Kecamatan Pallangga, sekarang Desa Somba Opu (hasil pemekaran) di Kecamatan Pallangga. Kini hanya tinggal kenangan bahwa di tempat itulah pernah ada benteng yang kokoh dan tangguh, yang di dalamnya ada sebuah pusat kerajaan maritim (Ibukota Kerajaan) yaitu kerajaan Gowa Makassar dan pelabuhan internasional Somba Opu. Sebelum Raja Gowa IX "Tumaparisi Kallonna", kerajaan Gowa tidak pernah mendirikan benteng. Hal ini disebabkan karena pada waktu itu situasi

kerajaan masih dalam keadaan statis. Disamping itu wilayah kekuasaan Bate Salapang yang mula diterimakan kepada Tumanurung sebagai raja yang pertama sampai ke masa pemerintah Raja Gowa VIII "I Pakere Tau" yang sepeninggalnya digelar "Tunijallori Pasukki" (raja yang diamuk dengan galah yang runcing) belum ada ide perluasan kekuasaan. Jadi dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan masih bersifat statis (Abbas & Arifah, 2013: 38).

Selanjutnya, mulai pada masa Raja Gowa IX Tumaparisi Kallonna barulah timbul ide perluasan kekuasaan kerajaan Gowa mulai bersifat dinamis kreatif. Dalam situasi perluasan kerajaan inilah Kerajaan Gowa memasuki babak baru dalam sejarahnya yakni mulai didirikan benteng sebagai tempat pertahanan dalam perlindungan akibat reaksi atas ekspansinya untuk memperluas daerah kekuasaannya (Darwas dalam Abbas & Arifah, 2013: 38). Raja Tumaparisi Kallonna (1510-1546) putra dari hasil perkawinan antara Raja Gowa Batara dan Putri pedagang kapur yang datang dari utara (Irerasi) dipandang sebagai peletak dasar kebijaksanaan itu karena Ia mengawali pendirian istana Somba Opu di muara Sungai Jenneberang. Kebijaksanaan itu bukan hanya diarahkan untuk membuka pelabuhan dagang bagi Gowa tetapi juga giat mengawasi kegiatan perniagaan di wilayah Sulawesi Selatan. Keinginan itu terungkap melalui kegiatan perluasan pengaruh kekuasaan atas sejumlah besar kerajaan-kerajaan pesisir dan maritim di daerah itu dan juga kerajaan-kerajaan agraris (Abbas & Arifah, 2013: 38-39).

Usaha itu diawali dengan perang saudara antara kerajaan Tallo yang diakhiri dengan perjanjian persekutuan pada tahun 1528. Hasil dari perjanjian itu

adalah terbentuknya kesatuan pemerintahan dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Kembar Gowa Tallo yang dalam berbagai pemberitaan bangsa Eropa disebut Kerajaan Makassar. Kerajaan Kembar (Gowa Tallo atau Kerajaan Makassar) dalam perkembangan selanjutnya melakukan perluasan pengaruh kekuasaan atas kerajaan-kerajaan lain, seperti Siang, Bacukiki, Suppa, Garasi, Katingang, Parigi, Sidenreng, Bulukumba dan Selayar. Perluasan kekuasaan itu jelas menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan kerajaan itu bertujuan untuk meraih supremasi dalam mengawasi kegiatan perdagangan di daerah ini (Abbas & Arifah, 2013: 39).

2. Peranan Benteng Somba Opu pada Masa Kejayaan Kerajaan Gowa

Sampai abad XI sejarah Gowa ataupun Makassar masih gelap, malahan sampai abad XII pun belum ada tanda-tanda yang dapat memberikan harapan akan terungkapnya tabir masa lalu itu. Barulah pada tahun 1364 sebuah buku dan peradaban di Pulau Jawa disebut Negara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca ditemukan perkataan Makassar. Menurut buku tersebut bahwa daerah takluk, Kerajaan Majapahit adalah seluruh Sulawesi Selatan dan yang menjadi daerah VI Kerajaan Majapahit yaitu Bantayan (Bantaeng), Luwuh (Luwu), Udhmakatra (Talaud), Makassar (Makassar) Butun, Banggawai (Banggai), Kunir (P. Kunit), Salaya (Selayar), Solor (Solor) (Mattulada dalam Abbas & Arifah, 2013: 47).

Gowa baru muncul dalam lembaran sejarah Sulawesi Selatan sekitar abad ke-13, melalui berbagai sumber antara lain dari cerita rakyat, benda-benda peninggalan sejarah, tulisan yang berasal dari luar, dan lontara' (himpunan cerita yang memuat silsilah raja-raja Wajo, Gowa, Bone, Soppeng, Luwu, Sidenreng,

dan Massenrempulu), sedangkan prasasti yang menjadi sumber terpenting untuk mengenal suatu dinasti serta periode pemerintahannya, sampai saat ini belum pernah ditemukan, baik yang terbuat dari batu maupun logam (Abbas & Arifah, 2013: 47).

Dalam cerita rakyat itu (misalnya cerita Sawerigading) diberitakan bahwa di Sulawesi Selatan, sebelum ada kerajaan terdapat beberapa kelompok masyarakat atau kesatuan hukum yang banyak jumlahnya. Suatu saat antar kelompok ini saling bertikai sehingga timbul kekacauan dimana-mana. Persatuan dan kesatuan tidak di dapatkan. Dalam situasi demikian, muncul seorang manusia luar biasa yang dianggap berasal dari kayangan. Ia turun ke dunia membawa ajaran demi keselamatan manusia. Diletakkannya dasar-dasar pandangan baru di bidang politik kepemimpinan dan pemerintahan. Orang yang dianggap penyelaman dan pemersatu tersebut disebut "Tumanurung", dan dasar pandangannya membuahakan suatu sistem pemerintahan yang disebut kerajaan. *Lontara*' menyebutkan beberapa Tumanurung yang ada di Sulawesi Selatan yakni Manurunge ri Matayang dari Kerajaan Bone, PettaE Matanna Manurunge ri Selarong dari Kerajaan Lamuru, Sampurusiang dari Kluwu, Tamboro Langi dari Tana Toraja, Sakkanyili dari Soppeng (Abbas & Arifah, 2013: 48).

C. Kerangka Pikir

Benteng Somba Opu merupakan salah satu objek wisata sejarah sekaligus cagar budaya yang terdapat di provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai objek wisata, Benteng Somba Opu sangat memerlukan perhatian dari pemerintah provinsi khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melihat fakta bahwa keadaan objek

wisata tersebut dalam keadaan yang tidak terawat dimana tidak adanya pembatas lokasi objek wisata dengan pemukiman warga setempat.

Perhatian dari pemerintah provinsi melalui Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata salah satunya dapat diwujudkan melalui pengembangan objek wisata Benteng Somba Opu antara lain berupa proses rekonstruksi. Indikator pengembangan pariwisata Benteng Somba Opu dalam penelitian ini dilihat dalam 6 aspek yaitu yaitu: (1) promosi, (2) aksesibilitas, (3) kawasan pariwisata, (4) produk wisata, (5) sumber daya manusia, dan (6) kampanye nasional sadar wisata.

Berdasarkan uraian di atas, skema kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pengembangan objek wisata Benteng Somba Opu oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan yang dilihat dari enam aspek indikator yaitu: (1) promosi, (2) aksesibilitas, (3) kawasan pariwisata, (4) produk wisata, (5) sumber daya manusia, dan (6) kampanye nasional sadar wisata.

E. Deskripsi Fokus

1. Pengembangan objek wisata adalah langkah-langkah yang ditempuh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengembangkan objek Wisata Benteng Somba Opu berdasarkan indikator (1) promosi, (2) aksesibilitas, (3) kawasan pariwisata, (4) produk wisata, (5) sumber daya manusia, dan (6) kampanye nasional sadar wisata.
2. Promosi adalah upaya memperkenalkan Benteng Somba Opu sebagai destinasi wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan.
3. Aksesibilitas adalah upaya menciptakan akses yang baik terhadap objek wisata Benteng Somba Opu antara lain membangun jalanan yang memadai menuju tempat wisata Benteng Somba Opu dan menciptakan petunjuk jalan yang memudahkan wisatawan untuk menemukan lokasi objek wisata Benteng Somba Opu.
4. Kawasan pariwisata adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk memperjelas kawasan objek wisata Benteng Somba Opu misalnya melalui bantuan dari pihak pemerintah maupun pihak swasta dan melakukan pembebasan lahan.

5. Produk wisata adalah upaya yang dilakukan untuk menampilkan produk wisata Benteng Somba Opu antara lain berupa artefak-artefak peninggalan Benteng Somba Opu dan rumah-rumah adat.
6. Sumber daya manusia adalah upaya memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang mengelola objek wisata Benteng Somba Opu.
7. Kampanye Nasional Sadar Wisata adalah kampanye yang dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada publik tentang pentingnya berwisata dan memperkenalkan kebudayaan suatu daerah melalui pariwisata.
8. Penambahan pendapatan daerah dari sektor pariwisata adalah adanya tambahan pendapatan daerah provinsi Sulawesi Selatan akibat adanya kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun dari luar negeri ke tempat wisata Benteng Somba Opu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan. Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 23 Mangkura, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2000) penelitian kualitatif merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan kebijakan pariwisata Benteng Somba Opu oleh pemerintah Sulawesi Selatan.

C. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian terkait variabel yang diteliti.

2. Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk menunjang data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen pendukung yang terkait dengan tempat penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri dari enam orang dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3.1. Informan Penelitian

No.	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1	Drs. Takdir H. Wata, M.Ap.	TW	Kepala Seksi Pengembangan DTW	1 orang
2	Dra. Purmawati, M.Hum.	Pu	Kepala Seksi Museum dan Cagar	1 orang
3	Dra. Hj. St. Arifah	SA	Kepala Seksi Sejarah dan Ilmu Tradisional	1 orang
4	Dra. Hj. A. Nurhuda, M.M.	AN	Kabid Sejarah dan Cagar Budaya	1 orang
5	Syamsinar, S.E., M.Si.	Sy	Kepala Bidang Pemasaran	1 orang
6	Marzuki	Ma	Kepala Pengelola Benteng Somba Opu	1 orang
Jumlah				6 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan kedua metode tersebut dalam penelitian ini diuraikan berikut ini.

1. Metode Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya

mengumpulkan data penelitian. Semua kegiatan, objek, serta kondisi penunjang yang ada dapat diamati dan dicatat. Hal-hal yang dilakukan dalam observasi ini adalah mengenai keadaan yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian yang berkaitan pengembangan kebijakan pariwisata Benteng Somba Opu oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya (Yusuf, 2014). Dalam hal ini wawancara mengadakan percakapan sedemikian hingga pihak yang diwawancarai bersedia terbuka memberikan keterangan yang dibutuhkan. Instrumen yang dipakai dalam wawancara biasanya adalah daftar (yang disebut pedoman wawancara) yang berisi garis-garis besar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, ataupun alat perekam audio ataupun audio-visual.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara mendalam (*in-depth interviewing*) yaitu jenis wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan *open-ended* dan mengarah pada kedalaman informasi dan tidak dilakukan secara formal terstruktur guna menggali informasi mengenai pengembangan kebijakan pariwisata Benteng Somba Opu oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang dapat diartikan sebagai barang-barang yang tertulis atau tercetak. Sukmadinata (2013: 221), studi dokumenter (*documentary study*) merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data arsip terkait pengembangan kebijakan pariwisata Benteng Somba Opu oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dimana langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain. Tahapan analisis data kualitatif sebagai berikut.

1. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data.
2. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.
3. Menuliskan 'model' yang ditemukan.
4. Koding yang telah dilakukan.

G. Teknik Pengabsahan Data

Validasi data sangat mendukung hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam

penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bennakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber dilakukan dengan cara mengecek pada data sumber lain yang telah diperoleh sebelumnya.
2. Triangulasi Metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan atau tidak akuratnya.
3. Triangulasi waktu yang dilakukan disini dengan menguji kredibilitas data yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lainnya dalam waktu dan situasi yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kebudayaan dan Kepariwisataaan Provinsi Sulawesi Selatan

Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kantor yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No 23. Kantor ini dahulunya adalah gedung Mulo yang merupakan bangunan bersejarah peninggalan pemerintahan Belanda, sejak pertama dibangun tahun 1927. Nama Gedung Mulo sendiri berasal dari sejarah gedung ini yang merupakan gedung Sekolah MULO (Meer Uuitgebreid Lager Onderwijs), sekolah yang merupakan basis bagi persamaan hak dari murid bumiputera (pribumi) dengan murid Belanda. Sekolah Mulo Makassar dibuka pada tahun 1920.

Tahun 1942, bangunan Gedung Mulo digunakan sebagai sekolah Jepang bernama Shihan Gakko, sekolah yang sejajar dengan dengan sekolah menengah pertama, Selanjutnya Gedung Mulo pernah digunakan sebagai Stafkwaftier NICA. Setelah itu berturut-turut berfungsi sebagai Kantor Daerah, Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, namun seiring perkembangan zaman dan peralihan kekuasaan dari kepala daerah satu ke kepala daerah berikutnya, gedung tersebut digunakan sebagai kantor Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Provinsi Sulawesi Selatan hingga sekarang.

2. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

Visi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan yaitu: "Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter". Visi ini mengandung pengertian sebagai berikut:

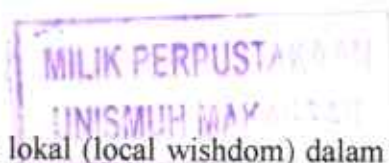
- a. Visi ini dipilih atas dasar pertimbangan bahwa era perdagangan bebas akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan Sulawesi Selatan sudah dapat menempatkan diri sebagai daerah terkemuka di bidang Kebudayaan, kesenian dan Pariwisata dengan keunggulan yang dimiliki.
- b. Terkemuka di Indonesia, mengandung pengertian setara dengan daerah (Provinsi) yang maju di Indonesia di bidang Kebudayaan, kesenian dan Pariwisata.

Adapun misi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebagai berikut:

- a. Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter.
- b. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel.
- c. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.
- d. Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif.
- e. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.

3. Tujuan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata di Sulawesi Selatan bertujuan untuk:



- a. Menginternalisasi nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) dalam kehidupan riil masyarakat Sulawesi Selatan
- b. Mengembangkan budaya unggul masyarakat Sulawesi Selatan sebagai bagian dari upaya melestarikan eksistensi masyarakat Sulawesi Selatan sebagai komunitas terkemuka.
- c. Mengembangkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pangamalan nilai-nilai budaya daerah.
- d. Melestarikan seni tradisional daerah dan pengembangan seni Kontemporer / modern.
- e. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, dan mengendalikan angka pengangguran melalui dukungan pengembangan industri pariwisata yang maju dan berdaya saing secara berkelanjutan.
- f. Mengembangkan sinergitas dan kemitraan dalam pengembangan industri pariwisata Sulawesi Selatan yang maju dan berdaya saing secara berkelanjutan.
- g. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia para pelaku industri pariwisata dan aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mendukung pengembangan budaya unggul dan industri pariwisata Sulawesi Selatan yang maju dan berdaya saing secara berkelanjutan.
- h. Menata sistem dan budaya organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk menciptakan budaya kerja yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan inovatif.

Secara umum, tujuan Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Memantapkan kelembagaan, untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif menuju peningkatan kinerja yang efisien dan efektif.
- b. Membangun tumbuhkembangnya karya kreatif, kerja produktif dan karya inovatif dalam pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.
- c. Memperbaiki citra pariwisata dan menggiatkan pemasaran dalam dan luar negeri.
- d. Mengupayakan pelestarian, pengembangan budaya dan seni Daerah.
- e. Membangun kerjasama lembaga kebudayaan dan pariwisata Nasional dan International serta mendorong peningkatan peran serta masyarakat.

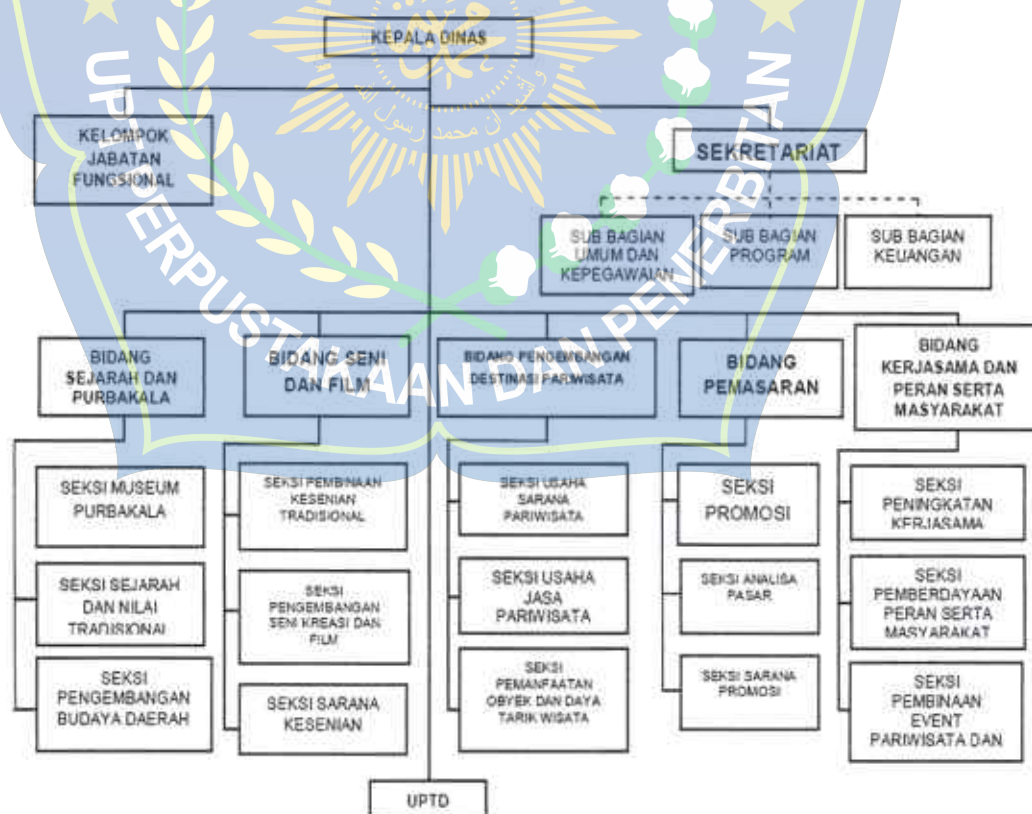
4. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan strategi memerlukan suatu kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan sebagai berikut:

- a. Pelestarian dan pengembangan budaya dan seni keunggulan lokal.
- b. Pengembangan industri seni budaya dan pariwisata yang profesional dan berstandar dan Pengembangan citra destinasi.
- c. Pemantapan pasar wisata konvensional dan pengembangan pasar wisata baru.
- d. Penguatan kerjasama kelembagaan masyarakat dan pemerintah.

5. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan

SKPD Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Peraturan Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Sesuai pedoman daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan seperti yang disajikan pada Gambar 4.1 berikut:



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan

6. Tugas dan Fungsi

Setiap elemen dalam struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dijelaskan sebagai berikut.

a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas pokok memimpin Dinas dalam menyelenggarakan tugas pokok perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan dan pembinaan kebudayaan dan kepariwisataan sesuai dengan Kebijakan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi dalam:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan, Kesenian dan Kepariwisata;
- 2) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota;
- 3) Pembinaan teknis di bidang Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata lintas Kabupaten/Kota;
- 4) Pelaksanaan promosi Budaya / Pariwisata.

b. Sekertariat

Sekertariat yang dipimpin oleh seorang Sekertaris mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Program, Administrasi Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga, Administrasi Keuangan dan Kepegawaian serta Pelayanan Informasi / Publikasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekertariat mempunyai Fungsi :

- 1) Pelaksanaan Urusan Umum, Kearsipan, Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- 2) Pelaksanaan Urusan Penyusunan Program Pembangunan dan Kegiatan Dinas;
- 3) Pelaksanaan Urusan Keuangan Dinas;
- 4) Pelaksanaan Urusan Kepegawaian Dinas;
- 5) Pelaksanaan Pelayanan Pengumpulan dan Pengolahan data dan Informasi;
- 6) Pelaksanaan Evaluasi, Analisa dan Penyusunan Laporan;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Program

Sub bagian program dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas melakukan persiapan dan penyusunan anggaran dinas, pengumpulan, pengolahan, analisa, penyajian dan penyimpanan data statistik kebudayaan penyusunan program pembangunan kebudayaan dan pariwisata.

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Program, yaitu:

- 1) Menyusun program kegiatan Sub Bagian program dan Program Dinas;
- 2) Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- 3) Memantau, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;

d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola Administrasi

Umum dan Kepegawaian meliputi rencana formasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pengembangan karier dan kesejahteraan pegawai.

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yaitu:

- 1) Menyusun Rencana Kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; Memantau, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan.

e. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas mengelola Administrasi Keuangan meliputi anggaran, penggunaan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan.

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan, yaitu:

- 1) Menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan
- 2) Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- 3) Memantau, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- 4) Mengoreksi dan memaraf naskah dinas;
- 5) Menginventarisir sumber-sumber penerimaan dinas;
- 6) Menginventarisir dan mengkaji sumber-sumber penerimaan baru yang potensial;

B. Pengembangan Kebijakan Pariwisata Benteng Somba Opu

1. Promosi

Promosi merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan suatu destinasi atau objek wisata dalam hal ini objek wisata Benteng Somba Opu. Terkait hal tersebut informan Sy selaku Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Sulawesi Selatan mengungkapkan hal berikut.

Kalau untuk Benteng Somba Opu itu sebenarnya belum terlalu dipromosikan untuk sekarang karena masih dalam tahap ini ya perbaikan. Jadi untuk sementara tahun ini kita belum ada program untuk mempromosikan Somba Opu karena masih mau pembebasan lahan, masih mau pembenahan disana. Kita perbaiki dulu wilayah atau destinasi disana, infrastrukturnya dan sebagainya yang masih perlu dibenahi dan memang belum sama sekali dilakukan promosi BSO itu terutama di tahun ini. Nanti setelah pembenahan mungkin dalam satu sampai dua tahun ke depan baru dipromosikan kembali (Hasil wawancara Sy, tanggal 13 Februari 2020).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa upaya promosi Benteng Somba Opu sebagai salah satu destinasi wisata di provinsi Sulawesi Selatan belum dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan masih berjalannya pembenahan terhadap Benteng Somba Opu antara lain pembebasan lahan, infrastruktur, dan sebagainya. Masih berjalannya pembenahan tersebut menjadi penghalang untuk melakukan promosi yang tentunya menjadikan destinasi wisata tersebut menjadi tidak populer di kalangan wisatawan.

Informasi yang sejalan dengan hasil wawancara di atas diungkapkan oleh informan SA selaku Kepala Seksi Sejarah dan Ilmu Tradisional Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dalam hasil wawancara berikut.

Benteng Somba Opu saat ini dalam upaya pembenahan, sedang dilakukan upaya penetapan sebagai cagar budaya. Jadi belum dipromosikan untuk tahun ini. Kami berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait termasuk dengan pemerintah Kabupaten Gowa agar dikeluarkan kebijakan untuk dapat dilakukan pembenahan di Benteng Somba Opu (Hasil wawancara SA, tanggal 13 Februari 2020).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa belum dilakukan promosi benteng Somba Opu pada tahun ini karena masih dalam proses pembenahan dan penetapan Benteng Somba Opu sebagai cagar budaya. Adanya upaya penetapan Benteng Somba Opu sebagai cagar budaya tersebut juga diungkapkan oleh informan Pu selaku Kepala Seksi Museum dan Cagar Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.

Kawasan objek wisata itu yang juga merupakan cagar budaya untuk pengembangan kawasannya itu harus melalui proses penetapan dan itu sekarang sedang kami prioritaskan untuk ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya yang telah dimiliki provinsi Sulawesi Selatan (Hasil wawancara informan P, 14 Februari 2020).

Dari hasil observasi penulis di Benteng Observasi memang menunjukkan bahwa wisatawan yang berkunjung ke Benteng Somba Opu memang sangat minim. Pengelola Benteng Somba Opu juga menguatkan hal tersebut dalam hasil wawancara berikut.

Pengunjung disini itu kebanyakan mahasiswa. Itupun bisa dibilang bahwa tempat ini hanya dijadikan sebagai tempat berkumpul mahasiswa untuk melakukan even-even begitu bukan untuk berwisata dalam rangka mengenal lebih jauh Benteng Somba Opu. Kalau wisatawan yang memang khusus mengunjungi Benteng Somba Opu untuk mempelajari atau memahami Benteng Somba Opu itu sangat jarang sekali. Faktor yang menyebabkan itu adalah karena Benteng Somba Opu ini sedang dalam pembenahan dan masih sedang diperbaiki untuk dapat menarik wisatawan kedepannya (Hasil wawancara Ma, 13 Februari 2020).

Hasil wawancara di atas menginformasikan bahwa wisatawan yang berkunjung ke Benteng Somba Opu sangat minim karena Benteng Somba Opu masih sedang

dalam pembenahan agar dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Benteng Somba Opu.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya promosi Benteng Somba Opu dalam beberapa tahun terakhir tidak dilakukan karena masih dalam tahap pembenahan dan upaya penetapan sebagai kawasan cagar budaya.

2. Aksesibilitas

Aksesibilitas mengkaji tentang bagaimana kemudahan atau kenyamanan dalam mengakses atau melakukan perjalanan tempat tertentu dalam hal ini objek wisata Benteng Somba Opu. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan terkait aksesibilitas tersebut diungkapkan oleh informan Sy selaku kepala bidang pemasaran dalam hasil wawancara berikut.

Kita masih berupaya dalam hal penganggaran untuk memperbaiki akses ke BSO (Benteng Somba Opu) baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, baru sebatas itu untuk sekarang ini (Hasil wawancara Sy, 13 Februari 2020).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengembangan dari aspek akses menuju objek wisata Benteng Somba Opu masih sedang dalam proses penganggaran. Meskipun masih dalam tahap penganggaran, hal tersebut telah mengindikasikan adanya upaya memperbaiki akses menuju objek wisata Benteng Somba Opu.

Informan TW selaku Kepala Seksi Pengembangan DTW juga mengungkapkan keterangan terkait pengembangan objek wisata Benteng Somba Opu pada aspek aksesibilitas dalam hasil wawancara berikut.

Upaya yang dilakukan oleh Disbudpar Provinsi Sulsel yaitu senantiasa bersinergi dengan program-program kerja dari organisasi-organisasi perangkat daerah lainnya seperti Dinas PUPR, Dinas Kimpraswil, Pemukiman dan Prasarana Wilayah dan OPD lainnya seperti Dinas PSDA Sumber Daya Air Sulawesi Selatan baik yang ada di kota Makassar maupun di kabupaten Gowa (Hasil Wawancara TW, 13 Februari 2020).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Disbudpar (Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan sinergi dengan organisasi perangkat daerah lainnya dalam rangka pengembangan akses atau jalan ke tempat-tempat wisata khususnya tempat wisata Benteng Somba Opu. Upaya sinergi tersebut mengindikasikan bahwa dalam pengembangan aksesibilitas objek wisata, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan tidak bekerja sendiri karena terdapat perangkat-perangkat daerah yang memiliki wewenang untuk mengeksekusi misalnya untuk membangun jalan ke tempat wisata Benteng Somba Opu. Informan TW mengungkapkan lebih lanjut terkait hal tersebut dalam hasil wawancara berikut.

Dinas pariwisata tidak memiliki tupoksi untuk membangun jalan. Jadi yang membangun jalan adalah dinas-dinas teknis lainnya seperti dinas PUPR yang membuat jalan, jembatan dan sebagainya. Yang mengelola penataan sungai misalnya Dinas Sumber Daya Air dan sebagainya (Hasil Wawancara TW, 13 Februari 2020).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan tidak memiliki tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dalam membangun jalan sehingga bukan pihak Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata yang mengeksekusi untuk pembangunan jalan bagi tempat-

tempat wisata. Namun Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata melakukan sinergi agar akses jalan ke tempat-tempat wisata dapat diperbaiki atau dibangun sebagaimana dalam hasil wawancara sebelumnya.

Hasil observasi penulis di Benteng Somba Opu menunjukkan bahwa kondisi jalan yang menjadi akses ke Benteng Somba Opu cukup memprihatinkan dimana banyak terdapat lubang-lubang di jalan yang menjadi tempat tergenangnya air. Selain itu jalan setapak dalam kawasan Benteng Somba Opu yang terbuat dari batako tampak tidak rata dan juga menjadi tempat genangan air.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dilakukan pengembangan aksesibilitas menuju tempat wisata Benteng Somba Opu dengan membuat penganggaran untuk memperbaiki akses jalan dan bersinergi dengan pihak terkait dalam pembangunan jalan.

3. Kawasan Pariwisata

Pengembangan pada aspek kawasan pariwisata merupakan salah satu unsur penting dalam pengembangan suatu objek wisata. Terkait pengembangan kawasan pada objek wisata Benteng Somba Opu, informan Pu selaku Kepala Seksi Museum dan Cagar Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan mengungkapkan keterangan sebagai berikut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 kalau kawasan objek wisata itu yang juga merupakan cagar budaya untuk pengembangan kawasannya itu harus melalui proses penetapan dan itu sekarang sedang kami prioritaskan untuk ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya yang telah dimiliki provinsi Sulawesi Selatan. Setiap penetapan pengembangan untuk cagar budaya yang ada and termasuk berada pada tingkat provinsi itu melalui tim ahli cagar budaya provinsi. Dan tahun ini sedang dibuat dan kemarin itu sudah melalui proses di Kabid Hukum. Upaya penetapan itu diupayakan kalau bisa sampai menjadi cagar

budaya nasional karena jika telah menjadi cagar budaya nasional maka akan lebih banyak lagi bantuannya (Hasil wawancara informan Pu, 14 Februari 2020).

Hasil wawancara di atas menginformasikan bahwa pengembangan kawasan objek wisata yang juga menjadi kawasan cagar budaya termasuk Benteng Somba Opu harus melalui penetapan terlebih dahulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Atas dasar itu penetapan pengembangan kawasan Benteng Somba Opu pada tahun ini dalam proses pembuatan dan telah berada di Kabid Hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kawasan Benteng Somba Opu pada tahun ini sedang berada dalam proses penetapan untuk kemudian dikeluarkan hasil penetapannya baru kemudian dieksekusi. Disamping itu dari hasil wawancara tersebut di atas diketahui bahwa upaya penetapan Benteng Somba Opu sebagai cagar budaya itu dilakukan sampai tempat tersebut berstatus sebagai cagar budaya nasional agar memperoleh lebih banyak bantuan.

Informan Sy selaku Kepala Bidang Pemasaran mengungkapkan keterangan sebagai berikut.

Kenyataannya sekarang di Benteng Somba Opu itu infrastrukturnya banyak yang rusak, tidak terurus. Karena tidak terurus mengakibatkan masyarakat masuk ke dalam kawasan BSO bahkan ada yang mengakui bahwa itu tempat tinggalnya. Nah itu menjadi masalah yang diupayakan saat ini untuk mengeluarkan masyarakat yang mengaku bertempat tinggal dalam kawasan BSO (Hasil wawancara Sy, 13 Februari 2020).

Hasil wawancara di atas menggambarkan fakta bahwa terdapat masyarakat menempati kawasan objek wisata Benteng Somba Opu dan bahkan ada yang sampai mengakui bahwa itu tempat tinggalnya. Hal tersebut menjadi salah satu yang sedang diupayakan yakni membebaskan lahan yang ditempati masyarakat dalam rangka pengembangan kawasan Benteng Somba Opu.

Terkait upaya pengembangan kawasan objek wisata Benteng Somba Opu agar dapat menarik wisatawan, informan TW mengungkapkan keterangan dalam hasil wawancara berikut.

Untuk kawasan Benteng Somba Opu, itu tidak dilibatkan pihak swasta dalam pengembangan kawasan daya tarik wisata Benteng Somba Opu karena kawasan ini masuk dalam situs atau benda cagar budaya yang penanganannya sangat teknis sekali tidak membutuhkan pihak swasta (Hasil wawancara TW, 13 Februari 2020).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengembangan kawasan Benteng Somba Opu tidak melibatkan pihak swasta karena penanganannya bersifat sangat teknis sehingga tidak membutuhkan pihak swasta. Hal ini berarti bahwa pengembangan kawasan Benteng Somba Opu dilakukan oleh pemerintah saja. Informan TW mengungkapkan keterangan lebih lanjut mengenai kawasan pengembangan Benteng Somba Opu dalam hasil wawancara berikut.

Pada Benteng Somba Opu itu terdapat tiga kawasan yaitu kawasan inti, kawasan penyangga dan kawasan pengembangan. Kawasan inti merupakan kawasan yang tidak dapat diganggu gugat kecuali melalui penelitian atau survey dan ekskavasi, kemudian kawasan penyangga itu kurang lebih sama dengan fungsi kawasan inti. Dan kawasan pengembangan itulah yang akan dikembangkan sarana pendukung untuk keberadaan kawasan Benteng Somba Opu sebagai daya tarik wisata sejarah dan budaya yang daya tarik utamanya adalah benteng itu sendiri (Hasil wawancara TW, 13 Februari 2020).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pada objek wisata Benteng Somba Opu memang terdapat kawasan pengembangan yang digunakan untuk mengembangkan sarana-sarana penunjang objek wisata tersebut untuk menegaskan eksistensinya sebagai objek wisata sejarah dan budaya.

Hasil observasi di kawasan Benteng Somba Opu menunjukkan bahwa dalam kawasan Benteng Somba Opu terdapat beberapa rumah warga. Rumah

warga tersebut tampak telah lama menempati lokasi dalam kawasan Benteng Somba Opu.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dilakukan pengembangan kawasan objek wisata Benteng Somba Opu yang ditunjukkan dengan upaya pembebasan lahan, pengembangan sarana pendukung, dan penetapan Benteng Somba Opu sebagai cagar budaya nasional yang menambah eksistensi Benteng Somba Opu sebagai objek wisata sejarah dan budaya.

4. Produk Wisata

Produk wisata mencakup hal-hal apa saja yang dipublikasikan atau divisualisasikan dari suatu objek wisata. Benteng Somba Opu yang memiliki latar belakang sejarah yang melekat dalam perkembangan kebudayaan masyarakat setempat tentu menjadi destinasi wisata yang dominan menampilkan aspek sejarah tersebut sehingga Benteng Somba Opu dikategorikan sebagai objek wisata kebudayaan atau objek wisata sejarah. Sebagai objek wisata sejarah maka produk wisata yang disajikan tentunya merupakan benda-benda atau bangunan-bangunan bersejarah.

Informan TW selaku Kepala Seksi Pengembangan mengungkapkan keterangan terkait pengembangan produk wisata di Benteng Somba Opu dalam hasil wawancara berikut.

Untuk dapat menarik visitor atau pengunjung atau wisatawan di Benteng Somba Opu adalah memperbaiki atau merevitalisasi yang sementara dilakukan oleh pemerintah provinsi yang didalamnya dilakukan kegiatan berupa ekskavasi. Ekskavasi itu maksudnya menggali peninggalan artefak-artefak benda cagar budaya yang terkubur dalam tanah misalnya batu bata

bekas bangunan Benteng Somba Opu, atau berupa parit, bangunan-bangunan semi permanen, yang kemudian diupayakan untuk ditempatkan pada posisi semula (Hasil wawancara TW, 13 Februari 2020).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengembangan produk-produk wisata di Benteng Somba Opu dilakukan dengan proses ekskavasi yaitu menggali artefak-artefak bersejarah yang menjadi peninggalan Benteng Somba Opu kemudian mengupayakan penempatannya sesuai pada posisi semula. Informan TW lebih lanjut mengungkapkan keterangan sebagai berikut.

Juga dilakukan pembangunan replika rumah adat yang diperkirakan menurut alur ceritanya dari literatur sejarah misalnya dari Belanda atau dari para ahli sejarah serta ahli-ahli budaya dan arkeologi lainnya pernah ada dalam kawasan. Rumah replika tersebut mengakomodir rumah adat dari empat etnik di Sulawesi Selatan makassar kajang bugis, luwu, mandar, mamuju, mamasa toraja, dan pembangunan baruga misalnya termasuk museum karaeng pattingaloang. (Hasil wawancara TW, 13 Februari 2020).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dilakukan pula pembangunan replika rumah adat atau bangunan-bangunan yang diperkirakan pernah ada dalam kawasan objek wisata Benteng Somba Opu sesuai dengan literatur sejarah baik dari Belanda maupun dari ahli-ahli sejarah lainnya.

Hasil observasi di Benteng Somba Opu yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa terdapat terdapat upaya penggalian dalam benteng Somba Opu untuk mencari benda-benda peninggalan lainnya dan juga penggalian pada bagian tembok Benteng Somba Opu yang tertimbun tanah. Di samping itu, sedang ada upaya perbaikan beberapa rumah adat dalam Benteng Somba Opu.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dilakukan pengembangan produk wisata Benteng Somba Opu dilakukan melalui proses ekskavasi dan revitalisasi. Proses ekskavasi merupakan proses penggalian

terhadap benda-benda bersejarah dan proses revitalisasi adalah proses pembangunan bagian-bagian bangunan agar tampak sesuai dengan aslinya.

5. Sumber Daya Manusia

Pengembangan pariwisata tentunya tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang mengelola sektor pariwisata tersebut. Semakin baik kualitas sumber daya manusia yang mengelola maka semakin baik pula pengembangan pariwisatanya. Informan TW selaku Kepala Seksi Pengembangan mengungkapkan keterangan terkait sumberdaya manusia di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata dalam hasil wawancara berikut.

Disini terdapat bagian yang menangani pengembangan sumber daya manusia atau pengembangan sumber daya wisata. Bagian ini melakukan sosialisasi terkait kesadaran berwisata (Hasil wawancara TW, 13 Februari 2020)

Hasil wawancara di atas sejalan dengan keterangan yang diungkapkan oleh Informan Pu selaku Kepala Seksi Museum dan Cagar dalam hasil wawancara berikut.

Perbaikan SDM disini dilakukan terutama pada saat rekrutmen dimana dipilih orang-orang yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya (Hasil wawancara informan Pu, 14 Februari 2020).

Dari hasil observasi di Kantor Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan diketahui bahwa latar belakang pendidikan staf atau pegawai yang bekerja di kantor tersebut cukup bervariasi. Ada yang berlatar belakang pendidikan magister manajemen, magister sains, sarjana ekonomi, dan sarjana hukum.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dilakukan pengembangan sumber daya manusia di dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan yang ditunjukkan dengan adanya bagian pengembangan Sumber Daya Manusia dan adanya proses perekrutan anggota yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan.

6. Kampanye Nasional Sadar Wisata

Terkait dengan adanya kampanye nasional sadar wisata dari dinas Kebudayaan dan Kepariwisata, informan TW mengungkapkan keterangan sebagai berikut.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bukan hanya terlibat dalam kampanye sadar wisata melainkan ia sebagai motor penggerak kegiatan tersebut ia merupakan pembina langsung, penanggung jawab tentang kampanye sadar wisata. Disini ada bidang yang menangani tentang kegiatan-kegiatan sosialisasi wisata salah satunya bidang pengembangan sumberdaya manusia atau bidang pengembangan sumberdaya pariwisata. Itu yang melakukan sosialisasi dan bukan cuma untuk Benteng Somba Opu tetapi untuk seluruh destinasi wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Namun hal tersebut tidak dilakukan secara serentak melainkan secara bergilir karena adanya keterbatasan termasuk keterbatasan dana (Hasil wawancara TW, 13 Februari 2020).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan tidak hanya terlibat dalam kegiatan kampanye sadar wisata melainkan sebagai motor penggerak, pembina utama dan penanggungjawab kegiatan tersebut. Di samping itu tergambar bahwa kampanye sadar wisata tersebut tidak dilaksanakan secara serentak melainkan secara bergilir atau bertahap karena adanya keterbatasan termasuk keterbatasan dana.

Hasil wawancara di atas sejalan dengan yang diungkapkan oleh informan AN selaku Kabid Sejarah dan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dalam hasil wawancara berikut.

Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata terlibat sebagai penanggung jawab program kampanye nasional sadar wisata. Karena memang kegiatan ini merupakan kegiatan dari dinas (Hasil wawancara AN, 14 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan bukan hanya terlibat dalam kampanye sadar wisata melainkan sebagai pembina utama sekaligus penanggung jawab kegiatan tersebut.

C. Pembahasan

1. Promosi

Dari hasil penelitian diketahui bahwa upaya promosi Benteng Somba Opu dalam beberapa tahun terakhir tidak dilakukan karena masih dalam tahap pembenahan dan upaya penetapan sebagai kawasan cagar budaya. Upaya promosi terhadap suatu objek wisata merupakan upaya untuk menyampaikan kepada publik mengenai objek wisata tersebut. Sunaryo (2013: 177) mengemukakan bahwa aktivitas promosi kepariwisataan secara prinsip merupakan kegiatan komunikasi, yang dilakukan oleh organisasi penyelenggara pariwisata (destinasi) yang berusaha mempengaruhi khalayak atau pasar wisatawan yang merupakan tumpuan atau sasaran dari penjualan produk wisatanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan pasal 48 dikemukakan bahwa terdapat Badan Promosi Pariwisata Daerah yang mempunyai tugas antara lain: meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia,

meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa, dan meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa upaya promosi atau pemasaran pariwisata termasuk didalamnya objek wisata Benteng Somba Opu dimaksudkan antara lain untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke tempat tersebut. Apabila upaya promosi tidak dilakukan maka kunjungan wisatawan bisa menjadi sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali.

Upaya promosi Benteng Somba Opu yang belum dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan bukannya tanpa alasan. Fakta bahwa keadaan Benteng Somba Opu yang saat ini sedang dalam pembenahan terutama dalam hal pembebasan lahan akibat adanya oknum-oknum masyarakat yang menempati lokasi Benteng Somba Opu, menjadikan keputusan tersebut terbilang tepat. Jika upaya promosi tersebut dilakukan tentunya wisatawan yang kemudian mengunjungi Benteng Somba Opu dapat memperoleh kekecewaan ketika melihat kondisi Benteng Somba Opu saat ini.

2. Aksesibilitas

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dilakukan pengembangan aksesibilitas menuju tempat wisata Benteng Somba Opu dengan membuat penganggaran untuk memperbaiki akses jalan dan bersinergi dengan pihak terkait dalam pembangunan jalan.

Perbaikan terhadap akses jalan menuju tempat wisata termasuk dalam bagian pengembangan aksesibilitas sebagaimana dikemukakan oleh Yoeti (2008) bahwa aksesibilitas merupakan semua kemudahan yang diberikan bukan hanya

kepada calon wisatawan yang ingin berkunjung, akan tetapi juga kemudahan selama mereka melakukan perjalanan di daerah tujuan wisata.

Jalanan menuju tempat wisata merupakan salah satu bagian dari aspek aksesibilitas menuju tempat wisata, namun bukan hanya jalan melainkan segala fasilitas yang memberikan kemudahan kepada wisatawan menuju tempat wisata. Muta'ali (2015) mengemukakan bahwa ukuran keterjangkauan atau aksesibilitas meliputi kemudahan waktu biaya, dan usaha dalam melakukan perpindahan antara tempat-tempat atau kawasan. Dengan demikian perbaikan jalanan menuju tempat wisata Benteng Somba Opu termasuk dalam salah satu pengembangan aksesibilitas, namun masih ada aspek-aspek lain seperti kemudahan dari segi waktu dan biaya yang perlu diperhatikan dalam upaya pengembangan tersebut.

3. Kawasan Pariwisata

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dilakukan pengembangan kawasan objek wisata Benteng Somba Opu yang ditunjukkan dengan upaya pembebasan lahan, pengembangan sarana pendukung, dan penetapan Benteng Somba Opu sebagai cagar budaya nasional yang menambah eksistensi Benteng Somba Opu sebagai objek wisata sejarah dan budaya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan mengemukakan bahwa Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Dari pengertian

tersebut dapat dimaknai bahwa kawasan pariwisata merupakan kawasan yang memiliki fungsi pariwisata.

Kawasan pariwisata dalam hal ini kawasan Benteng Somba Opu merupakan kawasan yang menjadi wilayah atau area berdirinya Benteng Somba Opu berdasarkan literatur sejarah. Abbas & Arifah (2013) mengemukakan bahwa lokasi Benteng Somba Opu yang secara administratif berada dalam wilayah kelurahan Benteng Somba Opu, pada masa kerajaan Gowa mencapai keemasannya atau pada abad ke 17 adalah merupakan pusat kerajaan, benteng utama, dan pelabuhan internasional kerajaan Gowa.

4. Produk Wisata

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengembangan produk wisata Benteng Somba Opu dilakukan melalui proses ekskavasi dan revitalisasi. Proses ekskavasi merupakan proses penggalian terhadap benda-benda bersejarah dan proses revitalisasi adalah proses pembangunan bagian-bagian bangunan agar tampak sesuai dengan aslinya.

Pengertian Ekskavasi dalam kepurbakalaan adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui penggalian tanah yang dilakukan secara sistematis untuk menemukan satu atau himpunan tinggalan arkeologi dalam situasi insitu (<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbjatim/pengertian-ekskavasi-dalam-kepurbakalaan/>). Pengertian tersebut menunjukkan bahwa tujuan ekskavasi adalah penemuan terhadap tinggalan berupa benda-benda bersejarah. Upaya ekskavasi tersebut sejalan dengan yang dilakukan di Benteng Somba Opu yang

dimaksudkan untuk menemukan benda-benda bersejarah yang merupakan peninggalan Benteng Somba Opu.

Selanjutnya pengertian revitalisasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. Proses revitalisasi Benteng Somba Opu dengan pembangunan kembali bagian-bagian bangunan Benteng Somba Opu agar tampak sesuai dengan aslinya telah sesuai dengan pengertian dalam Undang-Undang tersebut.

5. Sumber Daya Manusia

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dilakukan pengembangan sumber daya manusia di dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan yang ditunjukkan dengan adanya bagian pengembangan Sumber Daya Manusia dan adanya proses perekrutan anggota yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan.

Bagian pengembangan Sumber Daya Manusia di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan terlibat dalam pelatihan sumber daya manusia yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 52 dikemukakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kampanye Nasional Sadar Wisata

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Povinsi Sulawesi Selatan bukan hanya terlibat dalam kampanye sadar wisata melainkan sebagai pembina utama sekaligus penanggung jawab kegiatan tersebut.

Menurut Utami & Rahman (2017), program Kampanye Sadar Wisata dan Sapta Pesona. Program kampanye nasional ini diusulkan pada gerakan *Visit Indonesia Year* tahun 1991 dan merupakan salah satu aspek mendasar bagi keberhasilan pembangunan kepariwisataan. Selain itu Program Kampanye Sadar Wisata dan Sapta Pesona ini berfungsi menggerakkan daerah agar berupaya menyiapkan destinasi wisata di daerahnya untuk mengadakan kegiatan serta siap menerima wisatawan. Kampanye ini juga mendorong daerah-daerah yang berpotensi menjadi tujuan wisata namun belum dikenal masyarakat sehingga masyarakat tertarik untuk berkunjung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata Benteng Somba Opu oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Provinsi Sulawesi Selatan terindikasi dalam beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Upaya promosi Benteng Somba Opu pada dalam beberapa tahun terakhir tidak dilakukan karena masih dalam tahap pembenahan dan upaya penetapan sebagai kawasan cagar budaya.
2. Dilakukan pengembangan aksesibilitas menuju tempat wisata Benteng Somba Opu dengan membuat penganggaran untuk memperbaiki akses jalan dan bersinergi dengan pihak terkait dalam pembangunan jalan.
3. Pengembangan kawasan objek wisata Benteng Somba Opu yang ditunjukkan dengan upaya pembebasan lahan, pengembangan sarana pendukung, dan penetapan Benteng Somba Opu sebagai cagar budaya nasional yang menambah eksistensi Benteng Somba Opu sebagai objek wisata sejarah dan budaya.
4. Dilakukan upaya pelestarian produk wisata Benteng Somba Opu melalui proses ekskavasi dan revitalisasi.
5. Dilakukan pengembangan sumber daya manusia di dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan yang ditunjukkan dengan adanya bagian

pengembangan Sumber Daya Manusia dan adanya proses perekrutan anggota yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan.

6. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Povinsi Sulawesi Selatan bukan hanya terlibat dalam kampanye sadar wisata melainkan sebagai pembina utama sekaligus penanggung jawab kegiatan tersebut.

B. Saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut.

1. Organisasi-organisasi pemerintah daerah yang terkait dengan pengembangan objek wisata hendaknya bersinergi secara optimal sehingga pengembangan objek wisata Benteng Somba Opu dapat berjalan secara efisien.
2. Pihak Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata hendaknya memberikan perhatian khusus pada objek wisata Benteng Somba Opu agar upaya menjadikannya sebagai cagar budaya dapat segera tercapai.
3. Pihak masyarakat mestinya menyadari akan penting objek wisata yang sekaligus berfungsi sebagai cagar budaya karena hal tersebut merupakan kekayaan yang sangat berharga bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas & Arifah, ST. 2013. *Benteng Somba Opu Sulawesi Selatan*. Makassar: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
- Badrudin, Rudi. 2001. *Menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Pembangunan Industri Pariwisata*. Jurnal Kompak. No.3. Hal. 1-3.
- Fandeli, Chafid. 1995. *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Fandeli, Chafid. 2002. *Perencanaan Kepariwisata Alam*. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Ismayanti. 2010. *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: Grasindo.
- Marpaung, Happy. 2002. *Pengetahuan Pariwisata Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Muta'ali, Lutfi. 2015. *Teknik Analisa Regional untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan*. Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG) UGM, Yogyakarta.
- Pajriah, Sri. 2018. *Peran Sumber Daya Manusia dalam Pengembangan Pariwisata Budaya Di Kabupaten Ciamis*. Jurnal Artefak: History and Education, Vol.5 No.1 (25-34).
- Pendit, Nyoman S. 1999. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PT Pradiya Paramitha.
- Pitana, I.G. & P.G. Gayatri. 2007. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Purwanto, Joko & Hilmi. 1994. *Pengantar Pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- Ridwan, Muhamad. 2012. *Perencanaa Pengembangan Pariwisata*. Medan: PT. Sofmedia.
- Sujali. 1989. *Geografi Pariwisata dan Kepariwisata*. Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada.
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.

Utami, A.N., & Rahman, A.Z. 2017. Pelaksanaan Progam Kampanye Sadar Wisata dan Sapta Pesona melalui Pelestarian Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Jurnal dalam ejournal3.undip.ac.id.

Wahab, Salah. 1996. *Manajemen Kepariwisataaan*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Yoeti, O. A. 2008. *Ekonomi Pariwisata-Introduksi Informasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.

_____. 1996. *Psikologi Pelayanan Wisata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

_____. 1993. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Lampiran Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian







RIWAYAT HIDUP



Nurfatimah Ulfa. S., disapa Ulfa. Lahir pada tanggal 21 Agustus 1993 di Waiputih, Maluku Tengah. Anak kedua dari tiga bersaudara yang merupakan buah cinta dari pasangan suami istri Maryono dan Nuriam. Penulis menempuh pendidikan pertama selama enam tahun di SD Inpres Samal L Kobi Maluku Tengah dan selesai pada tahun 2006. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di Madrasah Tsanawiah Nurul Huda Samal Pasahari Maluku Tengah dan selesai pada tahun 2009. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di Madrasah Aliyah Nurul Huda Samal Pasahari Maluku Tengah dan selesai pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan dan memberikan manfaat.